



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERANAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Junindra Martua¹⁾, Rahmat²⁾, Yandi Putra Marpaung³⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : junindramartua@gmail.com, rahmathidayah2585@gmail.com, yandiputramarpaung@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Kota Tanjungbalai pada tahun 2016 mengalami kekacauan akibat kurang memahami terhadap perbedaan antar agama dan suku di masyarakat Kota Tanjungbalai, padahal di tubuh Pancasila sangat jelas tentang pentingnya kerukunan beragama, suku dan budaya. Tahun 2018 terdapat masyarakat Kota Tanjungbalai memiliki pemahaman yang berbeda atas ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila karena mereka menyatakan ideologi mereka berdasarkan atas agama yang mereka anut. Tentunya Pemerintah Kota Tanjungbalai bertugas untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila pada seluruh elemen masyarakat Kota Tanjungbalai. Dari kasus tersebut, bertujuan melihat peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai dalam melakukan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila pada masyarakat dan hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai dalam melakukan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila pada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Tanjungbalai dalam penghayatan dan pengamalan pancasila seperti malekukan pendidikan dan pelatihan, perlombaan lagu-lagu perjuangan dan berbagai kegiatan lainnya. Jika terjadi kerusuhan akibat kegagalan pemahaman pancasila yang dilakukan oleh seorang atau kelompok masyarakat, maka Kesbangpol Kota Tanjungbalai merekomendasikan kepada Walikota Tanjungbalai untuk segera menyelesaikan dan selain itu bekerjasama dengan BIN, TNI dan Polri melakukan operasi dini agar tidak terjadi kerusuhan yang berkelanjutan. Hambatan yang diterima oleh Badan Kesbangpol Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan penghayatan dan pengamalan pancasila sebagai ideologi negara adalah kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya pancasila dalam berkehidupan dan bernegara

Kata Kunci : Ideologi, Pancasila, Pembinaan

Abstract

The people of Tanjungbalai City in 2016 experienced chaos due to a lack of understanding of the differences between religions and ethnic groups in the people of Tanjungbalai City, even though within the body of Pancasila it is very clear about the importance of religious, ethnic and cultural harmony. In 2018, the people of Tanjungbalai City have a different understanding of the ideology of the State of Indonesia, namely Pancasila because they state their ideology is based on the religion they profess. Of

course, the Tanjungbalai City Government is tasked with increasing the appreciation and practice of Pancasila ideology in all elements of Tanjungbalai City society. From this case, it aims to see the role of the Political and National Unity Agency of the City of Tanjungbalai in appreciating and practicing the ideology of Pancasila in society and the obstacles the National Unity and Politics of the City of Tanjungbalai in carrying out the appreciation and practice of Pancasila ideology in society. Activities carried out by the Tanjungbalai Kesbangpol Agency in the appreciation and practice of Pancasila such as conducting education and training, contests of struggle songs and various other activities. If a riot occurs due to a failure to understand Pancasila by a person or community group, the Kesbangpol City of Tanjungbalai recommends to the Mayor of Tanjungbalai to immediately resolve it and in addition to this work together with BIN, TNI and Polri to carry out an early operation so that riots do not continue. Obstacles received by the Tanjungbalai City Kesbangpol Agency in carrying out the appreciation and practice of Pancasila as the state ideology is the lack of understanding of the community about the importance of Pancasila in life and as a state

Keywords: Ideology, Pancasila, Development

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki ideologi yang dinamakan Pancasila dikarenakan bangsa Indonesia membuatnya sebagai pandangan kehidupan yang diambil dari agama, budaya serta tradisi dimana hal tersebut ada di masyarakat Indonesia, Sejauh ini hukum yang dikemukakan oleh Muliadi, menyatakan bahwasannya hukum berasal dari Allah SWT seperti Ketuhanan Yang Maha Esa bersumber dari ajaran agama tersebar di Indonesia.

Secara etimologis makna ideology, punya arti ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar.¹ Dimana makna dari Pancasila dengan peranannya jadikan cita-cita, keyakinan, ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia yang fungsinya sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.²

¹Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis Dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013).

²Tubroni and Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham, Civil Society Dan Multikulturalisme* (Malang: Pusapon, 2007).

Sebelum dirumuskannya Pancasila jadi ideologi dan dasar Negara oleh pendiri bangsa, nilai Pancasila tersebut sudah berada pada bangsa Indonesia dalam berbagai agama. Negara Hukum merupakan negara yang memiliki asas negara hukum dimana segala perilaku dan tindakan warga negaranya diatur di dalam perundangan

budaya serta adat-istiadat sebagai pandangan hidup bermasyarakat Indonesia.³ Jadi dasar negara maka Pancasila adalah mutlak tiap semua warga negara harus mengakuinya. Hal ini dikarenakan Pancasila disebutkan di alinea ke-4 pembukaan UUD Tahun 1945. Maka sangat jelas terhadap setiap warga negara atau lembaga/organisasi/atau sejenisnya, ideologi berdasarkan Pancasila.

Kota Tanjungbalai merupakan kota madya, sehingga secara otonomi kotanya mempunyai pemerintah daerah tersendiri, dimana Indonesia mempunyai sistem

³Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Revisi 11 (Yogyakarta: Paradigma, 2016).

pemerintahan salah satunya ialah pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota),⁴ sementara itu arti pemerintah daerah ialah suatu pemerintahan otonom dalam NKRI,⁵

Daerah Tanjungbalaibalai sebagai kota berkembang memiliki jumlah penduduk 179.035 jiwa dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari beraneka agama, suku dan budaya, dimana jika dilihat keanekaragaman tersebut secara positif merupakan suatu kekuatan bermasyarakat dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa di Kota Tanjungbalai dimana perda dibuat untuk menertibkan kehidupan

bermasyarakat di daerah tersebut Namun jika lihat dari sisi negatif, hal ini merupakan potensi sebuah kerawanan sosial. Hal ini terjadi jika antar suku atau antar agama terjadi gesekan horizontal di masyarakat yang berakibatkan terjadinya kerusuhan ataupun kekacauan di masyarakat Kota Tanjungbalai.

Tentunya hal ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak terjadinya konflik horizontal di masyarakat akibat terjadinya kericuhan antar agama ataupun antar suku dan golongan. Perlunya aturan yang baik dan benar serta berkeadilan untuk mempayungi kegiatan di masyarakat tersebut agar toleransi dan tingakt berbangsa dan bernegara terus terjaga pada masyarakat Kota Tanjungbalai

⁴Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Satpol PP adalah bentukan pemerintah daerah salah satu organisasi perangkat daerah

Disinilah peran pemerintah daerah diperlukan menjaga bangsa dari kesatuan serta persatuan. Seperti sesuatu dimana bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terjaganya kesatuan serta persatuan bangsa ialah adanya melakukan pembinaan ideologi Negara Republik Indonesia yaitu melakukan pemahaman Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Termasuk adanya pelayanan publik, dimana Masyarakat menilai bahwasanya pelayanan publik merupakan salah satu indikator dimana belum sesuai dengan semestinya.⁶ Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tingginilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai termasuk pembanguan manusia berdasarkan Pancasila, hal ini terlihat pada sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang pada program Pemerintahan Kota Tanjungbalai yaitu tercipta atau terbentuknya kualitas manusia serta dimasyarakat Indonesia yang maju dengan suasana sejahtera serta tentram secara lahir batin, pada tataan kehidupan bermasyarakat, negara dan bangsa dimana dasarnya Pancasila serta

⁶Libna, Abdul Gani, and Junindra Martua, "Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum Adminsistrasi Negara," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019*, n.d., 114.

UUD 1945.⁷ Sesuai pada pernyataan Mahfud MD dimana dinyatakan bahwasanya politik hukum nasional dalam pembangunan harus mengarah pada tujuan negara dan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.⁸

Beberapa kejadian pada masyarakat Kota Tanjungbalai tentang kurangnya penghayatan dan pengamalan Pancasila terlihat dari beberapa kasus di bawah ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Tanjungbalai. Seperti terjadinya kebencian terhadap suatu suku, yang terjadi pada bulan Juli tahun 2016 dimana "Komnas HAM melalui Natalius di Jakarta mengatakan penyimpangan informasi dimana telah tersebar luas dan dilakukan oleh beberapa oknum saja adanya berkecenderungan kebencian pada beretnis Tionghoa di Tanjung Balai serta terpicunya membakar dan merusak tempat ibadah beretnis Tionghoa serta tempat tinggalnya. Ini tidaklah bersesuai terhadap dilarangnya diskriminasi etnis serta rasdimana di atur di Pasal 2, 3 serta 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.⁹ Tanggungjawab suatu Pendidikan bangsa ,Selanjutnya kejadian luar bisa di Kota Tanjungbalai yaitu penembakan terduga teroris, seperti terlihat pada pemberitaan

⁷Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2042, "Bab I Pendahuluan 1.1, Hlm. 1," n.d.

⁸Mahfud MD, "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, BPHN, 2006.

⁹www.republika.co.id/berita/obr3hd336/komnas-ham-kerusakan-tanjung-balai-melanggar-ham, n.d.

bahwa Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di tembaknya 2 laki-laki diduga teroris di Kota Tanjungbalai. Selain penembakkan, juga ditemukan bom rakitan bentuknya berupa pipa. Kapolres Tanjungbalai berkata 2 diduga teroris itu masalah terangkai pada kejadian tertangkapnya teroris Mei 2018. Ke-2 diduga teroris inisialnya RI serta AN warga Kab. Asahan serta Kota Tanjungbalai. Diamankan juga diduga bom seperti pipa.¹⁰

Dari kedua kejadian tersebut, bahwa ada beberapa masyarakat yang belum memahami adanya nilai dimana terdapat pada Pancasila. Hal ini terlihat pada masyarakat Kota Tanjungbalai pada tahun 2016 mengalami kekacauan akibat tidak adanya atau memahami terhadap perbedaan antar agama dan suku di masyarakat Kota Tanjungbalai, padahal di tubuh Pancasila sangat jelas tentang pentingnya kerukunan beragama, suku dan budaya di Kota Tanjungbalai. Kemudian pada tahun 2018 terdapat masyarakat Kota Tanjungbalai yang memiliki pemahaman yang berbeda atas ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila karena mereka menyatakan ideologi mereka berdasarkan atas agama yang mereka anut. Selain itu bahwa Indonesia ialah negara hukum di mana seluruh aturan di bentuk guna jaminan kepastian hukum serta ketertiban masyarakat.¹¹

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181019142245-12-339797/melawan-2-terduga-teroris-di-tanjungbalai-ditembak-polisi>, n.d.

¹¹Elyakim Mangatur Sirait, Ismail, and Emiel Salim Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian 4 (Empat) Tandan Buah

Atas kejadian diatas, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai mempunyai tugas untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila pada seluruh elemen masyarakat Kota Tanjungbalai, karena pemerintah Kota Tanjungbalai dimana pemerintah ialah perbuatan, cara ataupun urusan memerintah.¹²

Apalagi adanya bentuk kerjasama antara Kementerian dalam hal ini mewakili pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta lembaga/badan atau ormas, ini terlihat pada Permendagri No. 58 Tahun 2017 tentang kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan lembaga/badan atau ormas dalam bidang politik dan pemerintahan umum. Untuk memberi jawaban dalam perkara tersebut maka dirumuskan pada masalah penelitian yaitu bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai dalam melakukan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila pada masyarakat dan bagaimana hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai dalam melakukan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila pada masyarakat

B. Metode Penelitian

Sawit Menjadi Tindak Pidana Pencurian Berat Dalam Putusan No. 125/Pid.B/2018/PN.Kis,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020*, n.d., 64.

¹² Wirda Eka Putri, Rahmat, and Junindra Martua, “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019*, n.d., 239.

Peneliti memakai penelitian empiris, dimana dilakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,¹³ dan Sumber data primer ialah bahan hukum yang di dapat dengan cara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungbalai Dalam Melakukan Penghayatan Dan Pengamalan Ideologi Pancasila Pada Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan kegiatan pada bidang ideologi Pancasila dilakukan dengan atau sesuai aturan dimana sudah dibuat serta sesuai pada fungsi serta tugasnya Badan Kesbangpol yang terdapat pada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 53 Tahun 2016. Fungsi tugas ini tentunya jabaran dari sistem pemerintahan, dimana pemerintah melimpahkan kewenangannya terhadap pihak lainnya guna dilaksanakan.¹⁵

Dibuatnya tugas serta fungsinya tersebut agar jelas dan tidak adanya pelanggaran hukum serta tercapainya tujuan terhadap pemahaman ideologi negara Indonesia pada setiap masyarakat yang ada di Kota Tanjungbalai.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁵ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Kesbangpol Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentang ideologi dan bela negara terhadap penghayatan dan pengamalan Pancasila memiliki beberapa pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan seperti:

- a) Kegiatan dalam mengumpulkan segala informasi dan bahan keterangan yang terjadi di Kota Tanjungbalai pada bidang ideologi dan Bela Negara.
- b) Melakukan pemetaan terhadap kondisi yang terjadi pada karakter, wawasan kebangsaan dan ideologi yang ada di masyarakat Kota Tanjungbalai.
- c) Melakukan koordinasi pada pihak-pihak terkait dan melaksanakan dalam menguatkan ketahanan dan pemantauan terhadap ideologi negara pada masyarakat Kota Tanjungbalai.
- d) Melaksanakan serta melakukan pantauan dan meningkatkan terhadap kesadarannya guna bela negara dan cinta tanah air terhadap warga Kota Tanjungbalai.
- e) Mengembangkan dan membentuk karakter bangsa bagi masyarakat Kota Tanjungbalai dalam upaya melakukan pengembangan serta terbentuknya karakter bangsa
- f) Dilaksanakannya penanganan kehidupan nasional terhadap:
 1. perubahan lingkungan regional serta global
 2. dampak ideologi terhadap perkembangannya
- g) Nilai-nilai Pancasila dapat:
 1. diamalkan dan ditanamkan
 2. diaktualisasi serta revitalisasi

h) Wawasan kebangsaan serta ideologi bisa dilakukan pendidikan

i) Untuk tewujudnya eksistensi bangsa untuk simbol kehormatan dan kedaulatan negara di kota/kabupaten maka ditanam kecintaannya terhadap:

1. Lambang negara
2. Bahasa
3. Bendera

Salah satu kegiatan yang dilakukan Kesbangpol Kota Tanjungbalai dalam melakukan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan pada masyarakat Kota Tanjungbalai adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan atau diklat tentang bela negara dan penyuluhan pengamalan Pancasila bagi tokoh pemuda, ormas serta pelajar yang ada di Kota Tanjungbalai. Karena daerah mempunyai wewenang dibuatnya kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Tentunya harapan dengan adanya pendidikan dan pelatihan tentang bela negara dan penyuluhan Pancasila tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila kepada masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga masyarakat Kota Tanjungbalai yang majemuk dari agama, suku dan budaya serta ras dapat berdampingan hidup dengan aman dan damai.

¹⁶ Rahamat and Junindra Martua, "Peran Perangkat Daerah Kecamatan Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan," *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema: "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"*, n.d., 802.

Hal ini sesuai dengan Roadmap adanya pokok pembangunan serta adanya keinginan terhadap pembangunan keluarga di Kota Tanjungbalai dimana terlihat di Perwalkot Tanjungbalai No. 29 Tahun 2019 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungbalai Tahun 2017 – 2042, dimana kondisi yang diinginkan pada pembangunan keluarga salah satunya adalah Keluarga adanya ketahanan sosial, yaitu:

- a) Keluarga mempunyai kontribusi terhadap:
 1. mematuhi aturan perundangan
 2. taat bayar pajak
 3. partisipasinya pada kegiatan bela Negara
 4. Negara serta Bangsa
- b) Keluarga wawasan nasional
- c) Keluarga dimana mempunyai rencana sumberdaya keluarga.¹⁷

Disini terlihat bahwa kondisi keluarga di Kota Tanjungbalai nantinya keluarga yang memiliki ketahanan sosial yaitu salah satunya dengan jalan dimana adanya keluarga berpartisipasi dalam kegiatan bela negara dimana dalam bela negara tersebut adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Untuk melaksanakan kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila kepada masyarakat tentunya kesbangpol Kota Tanjungbalai tidak bisa bekerja

sendiri, harus bersama-sama dengan pihak lainnya. Hal ini juga terlihat pada Permendagri No. 58 Tahun 2017, bahwa kerjasama pada bidang pemerintahan umum dan politik ini memiliki ruang lingkup yaitu kerja sama antara:

1. Kementerian.
2. Pemerintah Daerah.
3. Ormas, Badan / Lembaga.¹⁸

Objek kerjasama yang dilakukan salah satunya adalah melakukan kegiatan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila,¹⁹ sehingga Kesbangpol Kota Tanjungbalai sebagai perangkat daerah kota Tanjungbalai memiliki kewenangan dan berkewajiban serta tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara ke pada masyarakat kota Tanjungbalai serta bekerjasama dengan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila tersebut. Kesbangpol Kota Tanjungbalai dapat bekerjasama dengan TNI/Polri, Badan Kesbangpol Provinsi dimana salah satu bentuk kerjasamanya adalah sebagai pelatih dan nara sumber dalam kegiatan tersebut.

Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara kepada masyarakat tentunya diharapkan terjadinya kedinamisan dan keharmonisasian diantara warga atau masyarakat di Kota Tanjungbalai. Tetapi

¹⁷Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Tanjungbalai, *Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2024*, 2017.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017, "Pasal 2," n.d.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017, "Pasal 4 Huruf B," n.d.

ada kalanya terjadi kesalahan pemahaman atau adanya peristiwa perbedaan ideologi masyarakat dengan negara sehingga terjadinya tindakan intoleransi, anarkis ataupun terosisme sehingga terjadinya kerusuhan ataupun pembunuhan di tengah-tengah masyarakat.

Seperti peristiwa terjadinya kebencian terhadap suatu suku, yang terjadi pada bulan Juli tahun 2016 dimana "penyimpangan informasi dimana telah tersebar luas dan dilakukan oleh beberapa oknum saja adanya berkecenderungan kebencian pada beretnis Tionghoa di Tanjung Balai serta terpicunya membakar dan merusak tempat ibadah beretnis Tionghoa serta tempat tinggalnya. Ini tidaklah bersesuaian terhadap dilarangnya diskriminasi etnis serta rasdimana di atur di Pasal 2, 3 serta 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam kasus ini Kesbangpol Kota Tanjungbalai memberikan rekomendasi kepada Walikota Tanjungbalai agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan, disamping itu juga Kesbangpol bersama BIN, TNI dan Polri melakukan operasi dini sampai ke setiap kelurahan untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang berkelanjutan. Selain itu permasalahan tersebut bisa diatasi dengan adanya kearifan lokal ataupun bahasa Inggrisnya disebut *local wisdom* ialah kekayaan bangsa Indonesia dimana kearifan lokal dijadikan cara untuk

ditemukan solusi dari terjadinya permasalahan di masyarakat.²⁰

Selanjutnya kejadian luar bisa di Kota Tanjungbalai yaitu penembakan terduga teroris, pada 18 Oktober 2018, dimana dua terduga teroris tersebut masih satu rangkaian dengan peristiwa penangkapan teroris Mei 2018 lalu. Dimana ke-2 diduga teroris itu masihlah terangkai pada kejadian tertangkapnya teroris Mei 2018. Ke-2 diduga teroris inisialnya RI serta AN warga Kab. Asahan serta Kota Tanjungbalai. Diamankan juga diduga bom seperti pipa. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kota Tanjungbalai yang memiliki perbedaan ideologi, dimana mereka tidak sepenuhnya ataupun tidak mengakui ideologi Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia. Sehingga untuk mengatasinya Kesbangpol melakukan sosialisasi, penyuluhan sampai pada pendidikan dan pelatihan tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia. Karena Pancasila bukannya suatu kompensasi politik, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam.²¹

²⁰ Indra Perdana Tanjung, "Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat Kabupaten Asahan," *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke Tema: "Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan Kearifan Lokal"*, n.d., 607.

²¹ Backy Krisnayuda, *Pancasila Dan Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia, 2016).

Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan dalam melaksanakan penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara adalah melaksanakan kegiatan perlombaan, seperti lomba menyanyi lagu kebangsaan, seperti kegiatan yang dilakukan Kesbangpol Kota Tanjungbalai atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu dilaksanakannya perlombaan berbagai lagu perjuangan kategori pelajar untuk menyemarakkan HUT RI ke-73 di 2018. perlombaan terdiri 3 kategori serta pelaksanaannya pada 13-14 Agustus 2018, Gedung Olahraga Kota Tanjungbalai.²²

2. Hambatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungbalai Dalam Melakukan Penghayatan Dan Pengamalan Ideologi Pancasila Pada Masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara oleh Badan Kesbangpol Kota Tanjungbalai tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini merupakan hambatan yang dialami oleh Kesbangpol Kota Tanjungbalai bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan Isu Strategis yang ditulis oleh Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila (BPIP) menyatakan bahwa salah satu dari lima (5) isi dari isu strategis yaitu kurangnya pemahaman Pancasila.²³ Kurangnya pemahaman tentang pancasila ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan, seperti:

1. Pemahaman yang diberikan terhadap pentingnya Pancasila pada saat ini tidak sepenuhnya melakukan pengembangan secara ilmiah, seperti melakukan pendekatan secara:
 - Transdisiplin
 - Multidisiplin
 - Pendintradisiplin
2. kurangnya daya tarik serta efektivitas dalam melakukan pembelajaran Pancasila.
3. kurang intensif dalam memanfaatkan ruang kebudayaan untuk dilakukannya terhadap pemahaman Pancasila.
4. Selama era reformasi terjadi penurunan aktivitas pembelajaran Pancasila sehingga akibatnya berkurangnya wawasan Pancasila kepada kaum muda dan pelajar.
5. Literasi masyarakat masih kurang sehingga turunya nalar kritis dan daya pikir masyarakat.

Tentunya hal permasalahan tersebut harus diatasi sehingga pemahaman tentang pancasila pada masyarakat dapat terwujud sehingga masyarakat sendiri memiliki daya pikir dan nalar kritis untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan pancasila sebagai ideologi

²²<https://tanjungbalaikota.go.id>, "Berita-Daerah/kesbangpol-Tanjungbalai-Semarakkan-Peringatan-Hut-Ri-Dengan-Perlombaan-Lagu-Perjuangan/," n.d.

²³Lampiran, "Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023," n.d.

negara. Tindakan–tindakan yang dilakukan untuk mengatasi pemahaman pancasila yang kurang tersebut kesbangpol Kota Tanjungbalai melakukan pendidikan dan pelatihan, perlombaan lagi perjuangan, sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai memberikan perhatian terhadap kurangan pemahaman tentang pancasila tersebut dengan melibatkan perangkat daerah dan lembaga atau lainnya untuk melaksanakan kegiatan tentang penghayatan dan pengamalan pancasila, seperti terlihat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai dengan mengeluarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungbalai Tahun 2017 – 2024 dalam roadmap pembangunan keluarga harus berpartisipasi dalam bela negara, dimana unsur bela negara adalah penghayatan dan pengamalan pancasila sebagai ideologi negara.

D. Kesimpulan

Kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Tanjungbalai dalam penghayatan dan pengamalan pancasila seperti melakukan pendidikan dan pelatihan, perlombaan lagu-lagu perjuangan dan berbagai kegiatan lainnya. Hambatan yang diterima oleh Badan Kesbangpol Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan penghayatan dan pengamalan pancasila sebagai ideologi negara adalah kurang pemahannya

masyarakat tentang pentingnya pencasila dalam berkehidupan dan bernegara.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis Dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Revisi 11. Yogyakarta: Paradigma, 2016.

Krisnayuda, Backy. *Pancasila Dan Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia, 2016.

Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Tanjungbalai, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota. *Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2024*, 2017.

- Tubroni, and Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham, Civil Society Dan Multikulturalisme*. Malang: Pusapon, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- 2. Jurnal dan Lainnya**
- Indra Perdana Tanjung. "Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat Kabupaten Asahan." *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke Tema : "Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan Kearifan Lokal"*, n.d., 607,2019.
- Libna, Abdul Gani, and Junindra Martua. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum Adminsistrasi Negara." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4, 2019*
- Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, Irma Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa Volume 23, Number 2, Agustus 2022*
- Dany Tri Hutama Hutabarat, Dkk, "Pentingnya Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Bernegara, Vol 1, No. 2, Juli 2022
- Emiel Salimsiregar, Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Tanpa Izin Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan", *Volume 2, No. 1, Februari 2022*
- Karoni Linda, Zaid Afif, "implementasi fungsi dan tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah kota tanjungbalai", *Citra Justicia, Vol. 22, No. 2, Agustus 2021*
- Emmi Rahmiwita Nasution, *Tanggung Jawab Hukum Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Dalam Pengawasan Dan Bantuan Operasional Sekolah, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 7, No. 1, Januari 2021*
- MD, Mahfud. "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006.*
- Putri, Wirda Eka, Rahmat, and Junindra Martua. "Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019, n.d., 239.*
- Rahamat, and Junindra Martua. "Peran Perangkat Daerah Kecamatan Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan."

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0", n.d., 802.

Sirait, Elyakim Mangatur, Ismail, and Emiel Salim Siregar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian 4 (Empat) Tandan Buah Sawit Menjadi Tindak Pidana Pencurian Berat Dalam Putusan No. 125/Pid.B/2018/PN.Kis." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020*, n.d., 64.

3. Undang-Undang

2017-2042, Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungbalai Tahun. "Bab I Pendahuluan 1.1, Hlm. 1," n.d.

2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun. "Pasal 2," n.d.

———. "Pasal 4 Huruf B," n.d.

Lampiran. "Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023," n.d.

4. Internet

<https://tanjungbalaikota.go.id>. "Berita-Daerah/kesbangpol-Tanjungbalai-Semarakkan-Peringatan-Hut-Ri-Dengan-Perlombaan-Lagu-Perjuangan/," n.d.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181019142245-12-339797/melawan-2-Terduga-Teroris-Di-Tanjungbalai-Ditembak-Polisi>," n.d.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum* www.republika.co.id. "https://www.republika.co.id/berita/obr3hd336/komnas-Ham-Kerusuhan-Tanjung-Balai-Melanggar-Ham," n.d.